

TESIS

**TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS
TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG
JABATAN NOTARIS**



**ANDI BINTANG OKTAVINDA
12224035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2026

Halaman Judul

TESIS

**TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP
PASAL 12 HURUF D UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

ANDI BINTANG OKTAVINDA

NIM : 12224035

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2026
PRO PATRIA

Halaman Prasyarat Gelar

TESIS

**TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP
PASAL 12 HURUF D UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

ANDI BINTANG OKTAVINDA

NIM : 12224035

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2026

Lembar Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DISIDANGKAN

Pada tanggal 03 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 06 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Lembar Penetapan Penguji Tesis

ANDI BINTANG OKTAVINDA

TESIS

PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. KHUSNUL YAQIN S.H., M.Hum

Anggota : Dr. HERU KUSWANTO S.H., M.Hum

: Dr.KUKUH MULJO RAHARDJOS.H., M.Kn

Ib.penguji tesis MKn

Pengajuan Judul Tesis



UNIVERSITAS Narotama
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda

No. Induk Mahasiswa : 12224035

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / Mkn.28

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. **PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. Heru Kuswanto, S.H., MHum., M.Kn
2. _____

Menyetujui,
 Ketua Program Studi

PRO PATRIA

Surabaya, 03 November 2025
 Mahasiswa

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Andi Bintang Oktavinda

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn

Kesediaan Membimbing Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jabatan Fungsional : Dosen Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda

No. Induk Mahasiswa : 12224035

Judul : PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP

PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D

UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Surabaya, 26 Agustus 2025
Calon Pembimbing,

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Persetujuan Dewan Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

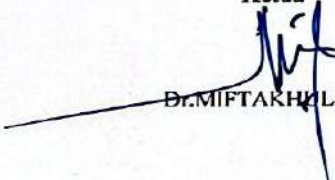
1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda
Nomor Induk Mahasiswa : 12224035
Program Studi : Magister Kenotariatan
- II. Judul Tesis: KOHERENSI SANKSI PELANGGARAN BERAT DALAM UNDANG -
UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN PRINSIP PROPORSIONALITAS
- III. Pembimbing: Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H

Disetujui oleh Dewan Tesis,
Di Surabaya Pada Tanggal 11 Agustus 2025

Ketua


DR. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Sekretaris


DR. TAHEGGA PRIMANANDA A, S.H., M.H.

^{*)} coret yang tidak perlu

Surat Penugasan



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN

No.655/NR.FH/03/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. HERU KUSWANTO S.H., M.Hum	12224035/ Magister Kenotariatan	ANDI BINTANG OKTAVINDA	Koherensi Sanksi Pelanggaran Berat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Prinsip Proporsionalitas

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. *[Signature]*

Kartu Bimbingan Proposal Tesis



UNIVERSITAS

*Narotama*Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

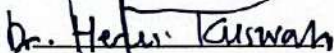
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda
No. Induk : 12224035
Alamat : Perumahan Citra Garden Cluster the Orchard
Blok H6 No. 9 Sidoarjo
Telp/HP : 082219990774
Pembimbing : Dr. Heru Kuswanto S.H., M.Hum., M.Kn
Judul Tesis : PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Tgl Dimulai : 14 Oktober 2025

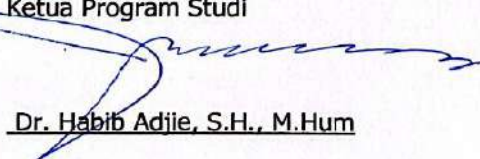
Surabaya, 03 November, 2025

Pembimbing

Mahasiswa


Dr. Heru Kuswanto
ANDI BINTANG OKTAVINDA

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	- Revisi kalimat dalam judul. - Pendaftaran UUTN, pasal 12, 16, 17	14/10/25	
2.	- Revisi rumusan masalah. 1 dan 2	17/10/25	
3.	- Pembetulan rumusan masalah ke 1 - dan 2 ke bab 2 & 3	23/10/25	
4.	- Perbaikan visi bab 2 & 3 rencana	30/10/25	
5.	Tidak boleh ada singkatan dalam penulisan UU (revisi), ACC proposal	6/11/2025	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

Pengajuan Ujian Proposal Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda

No. Induk Mahasiswa : 12224035

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /Mkn28

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP

PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Menyetujui Untuk Diuji

Surabaya, 03, November, 2025

Pembimbing,

Ka. Prodi

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap

Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Proposal Tesis



UNIVERSITAS Narotama
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

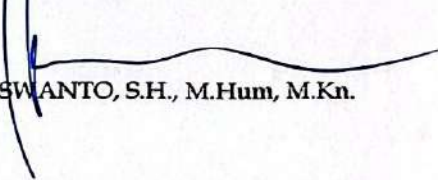
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : ANDI BINTANG OKTAVINDA
NIM : 12224035
Tanggal Penilaian : 13 November 2025
Judul Proposal Tesis : PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D
UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS
Pembimbing : Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum, M.Kn.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum, M.Kn.	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. Sjaifurrachman, S.H., MH	

Surabaya, 17 November 2025
Pembimbing,


Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum, M.Kn.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.

Kartu Kehadiran Mengikuti Proposal Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda, S.H.

No. Induk : 12224035

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF/ PENGUJI
1.	Neng Ani Saputri	Tanggung gugat notaris atas diterbitkan nya salinan kedua untuk PK dan adendum terhadap objek rumah di m prosed selanj	13/11/25	✓ p k
2.	Muhamad Isbal Hamdani	Pertanggung jawaban pemilik hak atas tanah terhadap penanaman izin usaha pertambangan	13/11/25	✓ p k
3.	Benny Wahyudi	Revisi Partial dalam Akta Janggunan.	13/11/25	✓ p k
4.	Dewi Gricia	Pusat Kuasa notaris sebagai berlakui kehati-hatian y/keabsahan akte autentik.	13/11/25	✓ p k
5.	Irfah Aprilia Rahma. (12224024)	Kepastian hukum tentang kepemilikan harta bersama bagi obyek fahpa pengantin kawin	13/11/25	3 + B.
6.	Aulia Anugrah Intan	Tanggung gugat notaris terkait kebocoran data pada penyusunan akta di cloud berdasarkan kan prinsip kehati-hatian.	13/11/25	sk A k
7.	Maylinda Hariyanto Putri	Peminatan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan terkait peralihan putusan secara resmi.	13/11/25	sk A k

Mengetahui,
Ketua-Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Surabaya, 13 November 2025
Mahasiswa

ANDI BINTANG OKTAVINDA.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda, S.H.

No. Induk : 12224035

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
8.	Dedy Alender Lado	Penerapan persamaan tarif Fokel pengurus daerah Ikatan notaris dalam perspektif keadilan.	13/11/25	2/11/25
9.	Aminah	Kepastian hukum syarat pengantar kata notaris pasca surat edaran direktoral jenderal administrasi hukum umum nomor Attu - AH.02-031/2024.	13/11/25	2/11/25
10.	Irone Kusuma	Keabsahan akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa menjual yg dipalsukan oleh notaris yg telah dipidana berdasarkan putusan MA. Nomor 1253/K/Pdt/2022.	13/11/25	2/11/25
11.	Andi Bintang Oktavinda	Penerapan teori kohoransi dan prinsip proporsionalitas terhadap pasal 12 huruf d UUP.	13/11/25	2/11/25
12.	Nurul Rosida	Penerapan Daluwarsa pembagian harta gonagini pasca perceraian.	13/11/25	2/11/25
13.	Fitrotul Aini	Ratio Legis ahli fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di tawarkan dengan program ketahanan pangan.	13/11/25	2/11/25
14.	Navita Linda Silvana	Implikasi hukum terhadap hak atas tanah yang terkena plating LSD.	13/11/25	2/11/25

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Surabaya, 13 November 2025
Mahasiswa

Kartu Bimbingan Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda
No. Induk : 12224035
Alamat : Perum. Citra Garden Cluster The Orchard H6 No. 9 Sidoarjo
Telp/HP : 082219990774
Pembimbing : Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum., M.Kn..
Judul Tesis : **PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D
UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**
Tgl Dimulai : 01 September 2025

Surabaya, 01 September 2025

Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn.

Andi Bintang Oktavinda

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Revisi Bab I dan setelah Sempro	05/11/2025	
2.	Bimbingan Hasil Revisi dan revisi rumusan masalah	17/11/2025	
3.	Daftar Isi untuk Bab II dan III	21/11/2025	
4.	Bimbingan Bab II	24/11/2025	
5.	Bimbingan revisi dan perbaikan Bab II	27/11/2025	
6.	Bimbingan Bab III	28/11/2025	
7.	Bimbingan Bab III Pembahasan dan revisi	08/12/2025	
8.	Bimbingan pembahasan dan pemantapan Bab II dan Bab III	19/12/2025	
9.	Bimbingan Saran Untuk Bab IV	26/12/2025	
10.	Pembahasan Bab I-IV	12/01/2026	
11.	Pembahasan Final seluruh bab I-IV	19/01/2026	
12.	Pembahasan Final dan siap untuk cek plagiasi	22/01/2026	

Surat Keterangan Lulus Naskah Uji Plagiasi Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*
FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa:

1. Nama Mahasiswa **ANDI BINTANG OKTAVINDA**
2. NIM **12224035**
3. Judul Skripsi /Tesis **Koherensi Sanksi Pelanggaran Berat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Prinsip Proporsionalitas**

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 19 JANUARI 2026

Mengetahui,

PRO PATRIA


Dr Miftakhul Huda, S.H., M.H
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tabegga Primananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi dan Tesis

Dekan,




Dr. Agusanto Sesung, S.H., M.H.

Pengajuan Ujian Tesis



UNIVERSITAS Narotama
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : Andi Bintang Oktavinda

No. Induk Mahasiswa : 12224035

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /Mkn28

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS
TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 20 Januari 2026.
Mahasiswa

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn..

Andi Bintang Oktavinda

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS(PETRA, UBAYA), EF, IALF, KELT)
3. Telah menyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR

Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Tesis



UNIVERSITAS Narotama
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

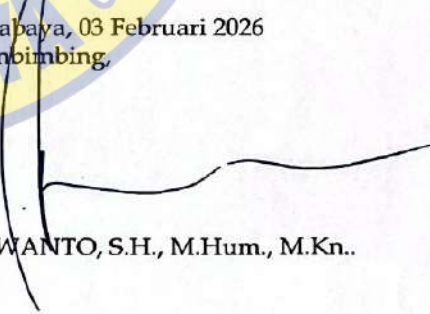
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : ANDI BINTANG OKTAVINDA
N I M : 12224035
Tanggal Penilaian : 03 Februari 2026
Judul Proposal Tesis : **PENERAPAN TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**
Pembimbing : Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum., M.Kn.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum., M.Kn..	
SEKRETARIS	Dr. KHUSNUL YAQIN S.H., MHum	
ANGGOTA	Dr. KUKUH MULJO RAHARDJO, S.H., M.Kn	

Surabaya, 03 Februari 2026
Pembimbing,


Dr. HERU KUSWANTO, S.H., M.Hum., M.Kn..

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 03 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



ANDI BINTANG OKTA VINDA

NIM : 12224035

Motto

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8)



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Penulis ucapkan atas segala karunia, nikmat, dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga usaha penalaran dan penelitian hukum yang berupa sebuah karya penelitian “Tesis Hukum” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tesis yang berjudul “Teori Koherensi dan Prinsip Proporsionalitas Terhadap Pasal 12 Huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris” ini merupakan penelitian yang membahas tentang suatu sanksi hukum terhadap Notaris yang dirasa sangat subyektif dan tidak proporsional dalam penegakannya, maka dari itu perlu adanya kajian secara normatif terhadap permasalahan tersebut dan perlu adanya perumusan serta batasan dan jenis sanksi yang jelas agar tidak subyektif, hal tersebut berguna untuk menjamin perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, yang pada akhirnya Penulis berusaha untuk menemukan titik terang sebuah permasalahan hukum mengenai seperti apa sanksi yang proporsional serta sesuai dengan teori koherensi.

Tidak hanya itu, selain sebagai Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh Penulis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, maka tesis ini juga menjadi suatu penalaran dan penelitian hukum yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan Penulis atas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia Notaris yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Teori Koherensi dan Prinsip Proporsionalitas Terhadap Pasal 12 Huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tesis pada program strata-2 di jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum, universitas Narotama, Surabaya dan juga sebagai syarat kelulusan pada strata-2 magister kenotariatan universitas Narotama.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin S.E., M.M.;
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing Penulis;
4. Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku dosen pengampu mata kuliah hukum waris dan dosen pembimbing dalam hal penulisan tesis ini;
5. Semua Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;

6. Staf Tata Usaha dan rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya , yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan Tesis ini;
7. Almarhum Papa H. Andi Baso Alam Mulki , dan Mama tercinta Hj. Roem Astutik , terimakasih atas segala doa , didikan dan pelajaran hidup serta support nya sehingga penulis dapat mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-citanya;
8. Suami tercinta Ardy Rachmansyah dan Anak – Anak Tercinta Zahfran Dzar A.R dan Zhafira Khansa Sabiha R. Terimakasih atas support, doa, cinta dan kasih sayangnya. Serta memahami kesibukan penulis dalam menjalani perkuliahan sampai selesai;
9. Teman-Teman Magister Kenotariatan Angkatan 28, atas segala kerjasamanya, support dan kebahagiaan nya dalam menjalani masa kuliah di Universitas Narotama Surabaya;
10. Semua pihak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.

Walaupun demikian, dalam tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh daripada kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Namun demikian, semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 11 Februari 2026

Penulis



Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk dan patuh dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang melanggar terhadap ketentuan UUJN akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang termaktub dalam UUJN, jenis sanksi terhadap Notaris ada dua yaitu sanksi perdata dan administratif, dalam Pasal 12 huruf D mengatakan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dikarenakan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan dalam jabatan, tentu saja makna Pasal 12 huruf D tersebut sangatlah subyektif karena UUJN tidak memberikan kategori sanksi yang masuk dalam pelanggaran ringan hanya mengatur sanksi pelanggaran berat yang mana pelanggaran tersebut berupa melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan, dalam hal ini penulis akan mengkaji apakah sanksi tersebut sejalan dengan asas proporsional dan teori koherensi atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan secara konseptual (*Conseptual Approach*),

Adapun hasil daripada penelitian ini yaitu pelanggaran berat yang dimaksud oleh Pasal 12 huruf D dengan melanggar kewajiban dan larangan sebenarnya tidak proporsional dikarenakan pelanggaran dengan sanksinya tidak seimbang atau proporsional, seyogyanya yang proporsional adalah pelanggaran berat yang melanggar hak individu dan melanggar harkat dan martabat seorang notaris bukan melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan, parameter penilaiannya berdasarkan kualitas pelanggarannya, kemudian norma Pasal 12 huruf D tersebut merupakan norma yang terikat dengan Pasal 77 UUJN sehingga apabila dimaknai menggunakan norma Pasal 77 tersebut maka ada inkoheren atau inkonsistensi norma, sehingga yang koheren adalah disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas pelanggaran yang mana perbuatannya haruslah melanggar hak individu serta melanggar harkat dan martabat jabatan Notaris.

Kata kunci: Proporsional, Sanksi, Koherensi, Notaris.

Abstract

Notaries in carrying out their duties must be subject to and comply with what is stipulated in the Law on the Notary Position, Notaries who violate the provisions of the UUJN will be subject to sanctions in accordance with those stipulated in the UUJN, there are two types of sanctions against Notaries, namely civil and administrative sanctions, in Article 12 letter D it says Notaries can be dishonorably dismissed by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council for committing gross violations of obligations and prohibition in office, of course the meaning of Article 12 letter D is very subjective because the Law does not provide a category of sanctions that are included in minor violations, only regulates sanctions for serious violations where the violation is in the form of violating obligations and prohibitions in office, in this case the author will examine whether the sanctions are in line with the principle of proportionality and the theory of coherence or not.

The research method used in this study is using a normative juridical method by approaching the Law (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).

The results of this study are that the gross violations referred to by Article 12 letter D by violating obligations and prohibitions are actually disproportionate because the violations with the sanctions are not balanced or proportionate, the proportionate should be a serious violation that violates individual rights and violates the dignity and dignity of a notary not violating obligations and prohibitions in office, the assessment parameters are based on the quality of the violation, then the norm of Article 12 letter D is a norm that is bound by Article 77 of the UUJN so that if interpreted using the norm of Article 77, there is an incoherence or inconsistency of the norm, so that what is coherent is adjusted to the capacity and quality of the violation where the act must violate individual rights and violate the dignity and dignity of the position of Notary.

Keywords: Proportional, Sanction, Coherence, Notary.

Ringkasan

Sanksi merupakan salah satu cara untuk menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi menurut hukum merupakan sanksi yang memang sudah diatur dalam peraturan. Segala peraturan yang ada yang memuat maupun syarat akan suatu pernyataan terhadap akibat dari tindakan-tindakan hukum, akibat-akibat hukum itulah dikatakan sebagai sanksi.

Sanksi merupakan instrumen pemaksa, selain sebagai bentuk daripada hukuman, sanksi juga digunakan sebagai alat untuk seseorang tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ada. Sanksi dapat diartikan sebagai alat pemaksa terhadap hubungan apabila tidak taat terhadap perjanjian. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa sanksi merupakan instrumen kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas suatu tindakan ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.

Dalam Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris mengartikan bahwa sanksi sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dimaksudkan sebagai suatu sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan sebagai alat untuk mendisiplinkan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

Sanksi dalam UUJN terbagi menjadi dua sanksi administratif dan sanksi perdata. Sanksi administratif dan perdata yang menjadi tujuannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Ketentuan pelanggaran berat yang termaksud dalam Pasal 12 huruf D UUJN merupakan salah satu jenis sanksi yang ada dalam UUJN, Pasal 12 huruf D mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

pelanggaran berat adalah dengan melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan maksudnya disini melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

Norma Pasal yang termaktub dalam Pasal 12 huruf D tersebut sangatlah subyektif dikarenakan penafsirannya sangat bergantung kepada orang yang menafsirkan dan juga tidak ada parameter yang jelas dalam UUJN yang mengatakan kapan suatu tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran berat dan tindakan pelanggaran ringan, sehingga norma Pasal 12 huruf D tersebut membuka ruang untuk ketidakadilan dikarenakan subyektifitas pemberi sanksi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu;

1. Apakah ketentuan sanksi pelanggaran berat yang terdapa dalam Pasal 12 huruf D sejalan dengan prinsip proporsionalitas?
2. Apakah sanksi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf D sejalan dengan Teori Koherensi?

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penlitu menguraikan dengan singkat sebagai berikut, Hans Kelsen dalam bukunya *pure theory of law* mendefinisikan norma sebagai norma yang terikat. Dalam dunia hukum, Undang-Undang yang disusun oleh badan legislatif, berisi norma yang bersifat menetapkan perilaku tertentu yang harus dilakukan (norma kesatu), kemudian norma yang menerapkan sanksi atas tidak dilakukanya atau tidak dipatuhinya norma yang berkaitan dengan tindakan yang tidak dilakukan (norma kedua), kemudian norma terhadap tindakan yang tidak dilakukan bukan merupakan norma yang bebas atau

berdiri sendiri, melainkan norma yang pada dasarnya memiliki keterikatan norma yang berkaitan dengan sanksi.

Norma terikat adalah norma yang menentukan makna norma lain, dengan memberikan definisi pada sebuah konsep yang digunakan dalam norma kedua atau dengan secara otentik menafsirkan norma kedua. Contohnya Pasal 12 huruf D UUDN mengatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam jabatan (sebagai norma kesatu), hal tersebut menjelaskan sanksi yang diterapkan kepada Notaris yang mana sanksi tersebut terikat dengan norma lain yang ada dalam UUDN yaitu norma yang terdapat dalam Pasal 77 UUDN yang mengatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada Menteri dengan usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (sebagai norma kedua), kemudian norma tersebut juga memiliki keterikatan dengan Menteri yang memutuskan untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 12 huruf D. Norma yang termaktub dalam Pasal 77 menurut Habib Adjie memberikan makna pemberhentian dengan tidak hormat yang diterapkan kepada Notaris tidak melalui jenjang sanksi, dalam arti bahwa Notaris bisa diberhentikan dengan tidak hormat secara langsung, tentu Pasal tersebut sangat subyektif dan tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas maupun konsep koherensi sehingga perlu adanya perumusan ulang terkait norma yang terdapat dalam Pasal tersebut

Pemberhentian dengan tidak hormat yang diterapkan kepada Notaris terkesan memiliki makna yang buruk, sehingga perlu adanya perumusan ulang

terakit pelanggaran berat yang dilakukan oleh Notaris, yakni apa saja kategorinya, penulis mencoba menulis parameter kategori tindakan pelanggaran berat bukan yang melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan tetapi perbuatan yang masuk dalam kategori tindakan berat haruslah tindakan yang melanggar hak individu orang lain serta melanggar harkat dan martabat jabatan Notaris, barulah pelanggaran berat tersebut dikatakan proporsional atau seimbang dengan sanksi yang diterapkan.

Apabila menilai tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang termaksud dalam Pasal 12 huruf D menggunakan parameter kualitas, maka pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris tidak memenuhi kualitas pelanggaran itu karena pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf D hanya bersifat administratif, sehingga sanksinya sangat subyektif, tidak proporsional dan tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Mengingat norma yang termaksud dalam Pasal 12 huruf D merupakan norma yang bersifat terikat, apabila memaknai norma Pasal 12 huruf D dengan Pasal 77 UUDN maka terjadi inkoheren atau inkonsistensi norma, sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang koheren adalah pelanggaran berat tersebut disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan, dengan catatan bahwa sanksinya haruslah melanggar hak individu orang lain serta merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris barulah dapat dikatakan sejalan dengan teori koherensi norma Pasal 12 huruf D tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Prasyarat Gelar	II
Lembar Persetujuan	III
Lembar Pengesahan.....	IV
Lembar Penetapan Penguji Tesis	V
Pengajuan Judul Tesis	VI
Kesediaan Membimbing Tesis	VII
Persetujuan Dewan Tesis.....	VIII
Surat Penugasan.....	IX
Kartu Bimbingan Proposal Tesis.....	X
Pengajuan Ujian Proposal Tesis	XII
Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Proposal Tesis.....	XIII
Kartu Kehadiran Mengikuti Proposal Tesis	XIV
Kartu Bimbingan Tesis.....	XVI
Surat Keterangan Lulus Naskah Uji Plagiasi Tesis.....	XVIII
Pengajuan Ujian Tesis	XIX
Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Tesis.....	XX
Surat Pernyataan Keaslian Tesis.....	XXI
Motto..	XXII
Kata Pengantar.....	XXIII
Ucapan Terima Kasih.....	XXIV
Abstrak.....	XXVII
<i>Abstract</i>	XXVIII
Ringkasan.....	XXIX
DAFTAR ISI.....	XXXIII
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1

1.2.	Rumusan Masalah	4
1.3.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1.	Tujuan Penelitian	5
1.3.2.	Manfaat Penelitian	5
1.4.	Orisinalitas Penelitian	6
1.5.	Tinjauan Pustaka	8
1.5.1.	Pejabat Umum	8
1.5.2.	Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum	10
1.5.3.	Teori Koherensi	12
1.6.	Metode Penelitian	18
1.7.	Sistematika Penulisan	21
BAB II		23
KETENTUAN SANKSI PELANGGARAN BERAT YANG TERDAPAT		
PADA PASAL 12 HURUF D SEJALAN DENGAN		
PRINSIP PROPORSIONALITAS		23
2.1.	Hakikat Pelanggaran Berat	23
2.2.	Kategori Pelanggaran Berat Dalam UUJN	31
2.3.	Ketentuan Sanksi Pelanggaran Berat Pada Pasal 12 Huruf D UUJN Sejalan Dengan Prinsip Proporsionalitas	37
BAB III		48
SANKSI YANG TERDAPAT DALAM PASAL 12 HURUF D		48
SEJALAN DENGAN TEORI KOHERENSI		48
3.1.	Hakikat Teori Koherensi	48
3.2.	Perbandingan Sanksi Pada Pasal 12 Huruf D <i>Juncto</i> Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN	62
3.3.	Sanksi Pasal 12 Huruf D Ditinjau Berdasarkan Teori Koherensi	75
BAB IV		81
PENUTUP		81
4.1.	Kesimpulan	81
4.2.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		